

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN DI BAKORWIL III MALANG

Choirotul Ummayyah¹, Ana Sopannah², Hartini P. Pawestri³

¹ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang, maya.esa21@gmail.com*

² *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang, anasopannah@gmail.com*

³ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyagama Malang, tingingharun@gmail.com*

Presenting Author: maya.esa21@gmail.com¹

*Corresponding Author: anasopannah@gmail.com², tingingharun@gmail.com³

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang pada tahun 2019 apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau belum. Analisis ini meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Hasil penelitian ini yaitu Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang telah menerapkan secara penuh Standar Akuntansi Pemerintah atas laporan keuangan tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan klasifikasi akun-akun yang digunakan dan format penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Sektor Pemerintahan, Laporan Keuangan

Abstract

The purpose of this research is to analyze the financial statements of the The Regional Coordination dan Development Agency Of East Java III Malang in 2019 whether it is in accordance with Government Accounting Standards or not. This analysis includes the recognition, measurement, and presentation of financial statements. This research uses descriptive qualitative method, namely the method of discussing problems that are outlining, describing, comparing and explaining data. The results of this study that the The Regional Coordination dan Development Agency Of East Java III Malang has fully implemented Government Accounting Standards of the 2019 financial statements. This is evidenced by the classification of accounts used and the format of presentation of financial statements in accordance with the provisions of the Government Accounting Standards listed in Government Regulation Number 71 of 2010.

Keywords: Government Accounting Standards, Government Sector, Financial Statements

PENDAHULUAN

Menurut Tulis S. dkk (2007) Akuntansi Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan ini merupakan prinsip – prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang merupakan salah satu SKPD yang penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Penyusunan laporan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Jawa Timur III Malang sudah mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 namun ada beberapa komponen laporan keuangan yang penyajian belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 salah satunya penyajian nilai aset tetap yang kurang terperinci di Catatn atas Laporan Keuangan.

Mengingat adanya tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik serta pentingnya laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Berdasarkan uraian yang disajikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang”

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Budi Purwantoro Jati melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan uji beda rata-rata sampel berhubungan. Pengujian. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara signifikan penerapan SAP Berbasis Akrual berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan terjadinya

peningkatan kualitas LKPD setelah penerapan SAP Berbasis Akruar. Hal ini dibuktikan dengan signifikannya beta penerapan SAP Berbasis Akruar dan meningkatnya rata-rata Opini BPK sebagai proksi dari kualitas LKPD setelah penerapan SAP Berbasis Akruar.

Erina Sudaryati dan Toton Da'I Permana melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruar dalam aspek Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akruar untuk tahun fiskal 2015. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya persiapan waktu, kesalahan aplikasi yang sering, beberapa staf mengalami kesulitan. Pada periode 2016-2017 pengembangan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait SDM Akruar telah dilakukan secara intens.

Jefri Fanuel Motos, Jantje J. Tinangon, dan Jessy D. L. Warongan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk Belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado.". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado sudah sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan penelitian tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk Belanja pada Dinas Kesehatan Kota, yakni kesesuaian pemberlakuan akuntansi belanja berdasarkan SAP yang terdiri atas beberapa poin mengenai pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan. Dinas Kesehatan Kota Manado sendiri telah didapati hasil kajian yang diberlakukan telah sesuai dan sejalan berdasarkan acuan peraturan pemerintah dan telah diberlakukan berdasarkan dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis Akruar pada pemerintah daerah.

Kajian Teori

Definisi dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah, dalam konteks akuntansi merupakan unit yang istimewa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berusaha memperoleh profit, pendapatan seluruhnya diperoleh dari pendapatan yang sifatnya "memaksa" yaitu berupa pajak atau pendapatan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memungutnya.
2. Pemerintah di 'miliki' secara kolektif oleh konstituen.
Berbeda dengan akuntansi komersial yang diterapkan dalam unit bisnis, kepemilikan atas pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kepemilikan modal yang mudah dialihkan, sehingga jika ada konstituen/warga negara yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahnya tidak dapat begitu saja mengalihkan hak kepemilikannya tersebut. Mereka harus melalui mekanisme yang panjang untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan yang dihasilkan, bahkan mungkin harus menunggu pemilihan umum berikutnya yang jika diterapkan di Indonesia warga negara harus menunggu lima tahun untuk dapat mengevaluasi keputusannya untuk memberikan kepercayaan kepada anggota DPR atau presiden yang terpilih.
3. Kontribusi sumber daya keuangan tidak dikaitkan langsung dengan pelayanan/produk yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam sistem yang diberlakukan di Indonesia dan juga di banyak negara lain, pembayar pajak kemungkinan besar bukan pihak penerima layanan terbesar dari pemerintah, hal ini disebabkan pengenaan pajak didasarkan dari kekayaan/kenikmatan yang dikonsumsi

oleh pembayar pajak, bukan dari seberapa besar atau seberapa banyak jenis layanan pemerintah yang mereka nikmati.

4. Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan di negara-negara yang menganut demokrasi.
5. Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka. Keputusan yang berimplikasi pada kepentingan publik harus dibuat secara terbuka. Di Indonesia, sidang pembahasan anggaran dapat dibuka secara publik dan melibatkan wartawan untuk meliputnya sehingga anggaran dan pertanggungjawabannya dapat dengan mudah dievaluasi oleh publik. Selain itu, publik juga dapat mengevaluasi bagaimana proses anggota perwakilan dalam pengambilan keputusan anggaran tersebut.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain DPRD, Badan Pengawas Keuangan, Investor, Kreditor, Donatur, Analisis dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2013).

Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah ini terdiri dari beberapa Kerangka Konseptual Akuntansi yang di susun sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan oleh sektor pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi itu sendiri adalah Konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Standar, selain berisi tentang Kerangka Konseptual (KK), juga berisi tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari 12 Pernyataan yaitu :

1. PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3. PSAP No 3 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP No 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP No 5 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP No 6 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP No 8 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP No 9 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
11. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP No 12 tentang Laporan Operasional

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif komparatif. Menurut Dr. Sugiyono (2005 : 21) statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan penelitian komparatif menurut Nuryaman dan Veronica Christina (2015 : 6) adalah penelitian yang tujuannya untuk mengetahui atau menguji perbedaan besaran, intensitas, atau jumlah nilai variabel tertentu antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Penelitian yang akan dilakukan terfokus kepada penyajian Laporan Keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Kota Malang Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Simpang Ijen No.2, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Sumber Data

Penelitian ini memiliki data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Kota Malang Provinsi Jawa Timur serta pihak-pihak yang terkait merupakan sumber data internal, yang menjadi sumber penelitian ini yaitu untuk tahun 2019. Data-data tersebut antara lain, Laporan Keuangan, Sejarah Umum SKPD dan catatan tertulis lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang relevan untuk memperoleh gambaran bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang.

2. Melakukan Wawancara dan Observasi

Peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang berkepentingan dalam menyusun Laporan Keuangan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang untuk mendapatkan data - data yang relevan dengan

penelitian.

3. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryifikasi.

4. Melakukan Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan mereduksi data – data yang relevan, peneliti melakukan analisis data sesuai dengan informasi yang telah diperoleh. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan Laporan Keuangan yang disajikan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang Tahun Anggaran 2019 dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengetahui apakah komponen – komponen laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai atau tidak dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

5. Penyajian Data

Dalam tahap ini data yang disajikan berupa data-data yang telah di reduksi dan analisis sehingga data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian sudah tidak ada lagi. Hal ini juga memudahkan peneliti di dalam melanjutkan penelitiannya dan untuk penarikan kesimpulan.

6. Menarik Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari data – data yang telah dikumpulkan, di reduksi, dan dianalisis. Apakah Laporan Keuangan yang disajikan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerinthan dan Pembangunan Jawa Timur III Kota Malang sudah sesuai atau tidak dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengakuan dan Pengukuran

Setiap aset yang diperoleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Jawa Timur III Malang diakui ketika pemerintah daerah melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria, yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak untuk dijual tetapi untuk digunakan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pendapatan dalam Akuntansi Pemerintah dibagi menjadi Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan – LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum. Beban pada Laporan Operasional diakui dengan metode Cash Basis yaitu diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari kas umum daerah.

Pengakuan dan Pengukuran Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, dan Beban yang di terapkan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III

Malang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntan Pemerintah.

Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Keuangan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tetapi merupakan modifikasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berikut adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 1.1 : Ringkasan Perbandingan Konsep Penyajian Laporan Keuangan Bakorwil Dan Dtandar Akuntansi Pemerintah

Konsep	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran	Sesuai
Penyajian	Sesuai

Sumber : Data yang telah diolah peneliti

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam proses pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Dari hasil analisis perbandingan antara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dengan laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang untuk komponen pengakuan dan pengukuran pada laporan keuangan sudah sesuai.

Dari hasil analisis perbandingan antara Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dengan laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang oleh bahwa untuk komponen penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran dimana badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang harus mempertahankan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

REFERENSI

Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan*

- Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan V*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hamzah, Andi P, dan Kustiani, Nur Aisyah. 2014. *Dasar – Dasar Akuntansi Pemerintahan*. STAN Press. Tangerang Selatan
- Jati, Budhi Purwanto. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Wahana Volume 21 No. 1, Februari 2019. Hal 1 – 14. Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Almaida. Sulawesi Selatan.
- Meliala, Tulis S, Silitonga, Niko, dan Sinaga Timbul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Semesta Media. Bandung.
- Motoh, Jafri Fanuel, Jantje J. Tinangon, dan Jessy D.L. Warongan. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah untuk Belanja Pada Dinas Kesehatan Kota Manado*. *Indonesia Accounting Journal*. Volume 2 Number 1. Hal. 44 – 51. Universitas Sam Ratulangi.
- Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Siyoto, Sandu, & Sodik,. Ali Sodik.2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Sudaryanti, Erina & Toton Da’I Permana. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Baki* Vol. 5 Nomor 1. Hal 1 – 7. Universita Airlangga Surabaya.
- Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarni, Murni dan Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. CV Andi Offset. Yogyakarta.